

ANALISIS FASILITAS EKONOMI PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Selvianti Yusnitasari
selviantiyusnitasari@gmail.com

Risyanto
risyanto@ugm.ac.id

Lutfhi Muta'ali
lutfhi@ugm.ac.id

Abstract

Tulang Bawang Barat is a district which was created by region development. The aim from that is to increase public, included economic facilities. Such market, bank, cooperation, stall, restaurant. The research aim are identify economic facilities after region development, serviceability of economic facilities, and determine the right economic facility location.

The research type is mixed method. The method for quantitative is paired sample t test, while for qualitative method use interview, which for government and trader use key person technique. For consumer, are used accidental method in Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, and Lambu Kimbang.

From this research, cooperation was the only one facilities who be influence by region development. It's can be explained from sig 2 tailed, 0,43. The development lead to city and rural urban. It's happen too in range of good. The location determination is leaded on village region.

Keyword : Regional development, Economic facility, service ability, location planning

Abstrak

Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten yang terbentuk karena pemekaran wilayah. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan pelayanan publik, termasuk fasilitas ekonomi, seperti pasar, bank, koperasi, warung, warung makan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fasilitas ekonomi setelah pemekaran wilayah, daya layan fasilitas ekonomi, dan menentukan titik lokasi fasilitas ekonomi.

Jenis penelitian ini adalah *mixed method*. Data kuantitatif digunakan uji *paired sample t test*. Sedangkan untuk kualitatif digunakan teknik wawancara. Pada pemerintah serta pedagang digunakan teknik *indepth interview*. Untuk konsumen digunakan metode aksidental pada tiga kecamatan sampel, yaitu Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang.

Dari Hasil penelitian, hanya koperasi yang terpengaruh oleh pemekaran wilayah. Ini terlihat dari nilai *sig 2 tailed*, yaitu 0,43. Perkembangan fasilitas lebih mengarah pada wilayah perkotaan dan *rural urban*. Hal yang sama juga terjadi pada *a range of good* dari masing-masing fasilitas. Penentuan lokasi diarahkan pada wilayah perdesaan.

Keyword: pemekaran wilayah, fasilitas ekonomi, Daya Layan, Perencanaan lokasi

PENDAHULUAN

UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi dasar perubahan pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang terfokus pada 3 dasar, yaitu demokratisasi, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak pemerintah daerah yang mewakili masyarakat daerah masing-masing untuk membentuk daerah otonom baru dengan menggunakan sistem pemekaran wilayah (Harmantyo, 2007). Untuk melihat perubahan pelaksanaan dapat dilakukan salah satunya dengan cara melihat perkembangan fasilitas pelayanan yang ada di kabupaten baru. Salah satu kabupaten baru yang terbentuk adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi perkembangan fasilitas ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah adanya pemekaran wilayah.
2. Mengidentifikasi daya layan fasilitas ekonomi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Menentukan titik lokasi fasilitas ekonomi yang tepat untuk memenuhi daya layan terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Tarigan (2010), pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administrasi suatu wilayah yang dahulunya berada dalam satu daerah administratif, dipisahkan menjadi dua atau beberapa daerah administratif. Dengan adanya pemekaran wilayah, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sosial masyarakat, dimana pemerintah sebagai pengatur, penjamin, dan pengawas Haryatmoko (2007). Salah satu jenis pelayanan publik adalah fasilitas ekonomi, yang berperan dalam memberikan fasilitas perdagangan dan jasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa

mixed method. Menurut Creswell (2010), metode ini merupakan gabungan dari metode Kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan berupa teknik wawancara yang dilakukan terhadap *stakeholder* terkait, kepada penyedia layanan jasa, pemerintah serta masyarakat selaku konsumen.

Wawancara terhadap konsumen dilakukan pada tiga kecamatan yaitu, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Lambu Kibang, yang masing-masing mewakili representasi dari perkotaan, wilayah *rural urban*, dan perdesaan. Jumlah 100 responden per fasilitas. Teknik sampling yang dipilih untuk merepresentasikan populasi yang ada adalah teknik sampling *non probability* dengan jenis sampel aksidental. Sedangkan untuk data sekunder, digunakan uji *paired sample t-test*, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tiap fasilitas setelah adanya pemekaran wilayah.

Untuk melihat daya layan dilakukan penilaian dengan menggunakan metode *a range of good* dan *threshold* yang dikemukakan oleh Chirstaller (1933). Indikator yang digunakan untuk menentukan daya layan fasilitas ekonomi pada Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata cara pengelolaan lingkungan perumahan di perkotaan nomor SNI 03- 1733-2004.

Tabel 1. Standar Daya Layan Fasilitas Ekonomi

INDIKATOR	Jml pdd (Jiwa)	Jarak
Toko/Warung	250	300 m
Rumah	6	2000 m
Pasar	30	2000 m
Bank	120	2000 m
Koperasi	120	2000 m

Sumber : SNI 03-1733-2004 dan kombinasi

Selain jangkauan jarak *a range of good*, waktu tempuh juga berpengaruh untuk mencapai tiap fasilitas. Jangkauan pelayanan menurut jarak maupun waktu dapat dianalisa dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan konsep *Network Analysis*.

Menurut Steinberg dkk (2006) *Network analysis* sangat berguna untuk mengkaji masalah jangkauan pelayanan, dimana *network analysis*

mengidentifikasi lokasi sebagai suatu node, sehingga dapat diidentifikasi jarak serta waktu terdekat untuk menjangkau titik lokasi pelayanan. Dengan diketahuinya daya layan yang ada, dapat ditentukan daerah mana yang penduduknya belum dapat terlayani oleh fasilitas terdekat. Sehingga dapat dilakukan arahan lokasi. Penentuan lokasi dapat menggunakan metode operasi logika dengan nilai biner (M. Mano & Charles R. Kime, 2008), dengan dasar logika "AND". Metode ini menggunakan hasil *threshold* dan *a range of good* berdasarkan jarak, dimana jika faktor-faktor tersebut dapat memenuhi standar yang ada, maka nilai biner yang dihasilkan adalah satu. Jika tidak memenuhi, nilai biner 0.

Logika "AND", melihat bahwa daya layan terpenuhi jika nilai *threshold* dan *a range of good* memenuhi standar. Standar nilai jarak yang digunakan berasal dari jarak ideal responden. Jika salah satu atau kedua faktor tidak memenuhi, hasil menunjukkan nilai 0, yang berarti dapat dilakukan arahan lokasi (Tabel 2). Selain melihat dari hasil operasi logika juga dilihat dari faktor pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2. Rumus Operasi Logika "AND"

X	Y	Z (X.Y)
I	0	0
0	I	0
0	0	0
I	I	I

Sumber: M Mano & Charles R. Kime, 2008

Ket:

X Nilai *threshold*

Y Nilai *a range of good*

Z = 0 dilakukan penentuan arahan lokasi

Z = I tidak dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Fasilitas Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dari Uji statistik *paired samples t-test*, adanya pemekaran wilayah ternyata belum dapat menunjukkan pengaruh terhadap perkembangan rata-rata fasilitas ekonomi yang ada. Pada uji tersebut (tabel 3), hanya koperasi yang memiliki nilai *sig 2 tailed* kurang dari 0,05. yaitu 0,043. Ini menunjukkan bahwa Ho diterima, dimana Ho merepresentasikan adanya perbedaan signifikan dalam pertumbuhan jumlah koperasi yang dipengaruhi oleh pemekaran wilayah, yang

berarti pemekaran wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah koperasi.

Tabel 3. Uji *Paired sample t test*

Jenis Fasilitas		sig. (2-tailed)
pair 1	Pasar - 2007 Pasar 2011	0.17
pair 2	Toko 2007 - Toko 2011	0.247
pair 3	WM 2007 - WM 2011	0.14
pair 4	Bank 2007 - Bank 2011	0.18
pair 5	Koperasi 2007 - Koperasi 2011	0.043

Sumber: hasil olah data sekunder, 2013

Hal tersebut lebih diakibatkan adanya ketimpangan fasilitas ekonomi antar kecamatan. Ketimpangan tersebut ternyata sesuai dengan perspektif masyarakat dalam menjangkau fasilitas ekonomi, terutama fasilitas dengan cakupan skala besar, seperti bank dan pasar. Pada wilayah perdesaan seperti Lambu Kibang, mayoritas masyarakat mengalami beberapa kesulitan dalam mendapatkan layanan fasilitas pasar maupun bank. Fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah hanya berjumlah satu unit, sedangkan bank tidak tersedia. Hal ini merupakan representasi dari wilayah perdesaan yang ada di kabupaten ini.

Pengelompokan fasilitas dengan skala besar terlihat pada ibukota kabupaten serta Kecamatan Tumijajar sebagai representasi *rural-urban*. Ketimpangan ini belum mencerminkan tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri, yaitu meningkatkan pelayanan publik di daerah-daerah yang sebelumnya terjangkau. Ini sebenarnya menjadi masalah tersendiri dalam masa pembangunan awal pemerintah itu sendiri. namun pemerintah sebagai badan pengawas, pengatur serta pembuat kebijakan memberikan insentif dalam pembangunan di tiap fasilitas yang ada. Berikut kebijakan terkait pengembangan fasilitas ekonomi.

Tabel 4. Kebijakan Pengembangan

Jenis Fasilitas	Kebijakan
Pasar	- Revitalisasi bangunan pasar
	- Rekomendasi perizinan gratis
	- Sistem sewa yang lebih mudah
	- Pemindahan PKL ke pasar
	- Pemberian iklim usaha pasar di wilayah utara
Bank	- Peningkatan infrastruktur terkait
	- Pengaktifan kembali koperasi tidak aktif
	- Memberikan penyuluhan sistem kerja
	- Mengawasi kegiatan rapat rutin koperasi
Koperasi	- Mengawasi kinerja koperasi secara aktif
	- Perizinan gratis
Toko/	

Warung	- Perizinan dengan metode satu pintu
Warung Makan	- Perizinan gratis
	- perizinan dengan metode satu pintu

Sumber: Hasil Olah Data Primer

2. Perbandingan Daya Layan Fasilitas Ekonomi

Teori Christaller memberikan dua faktor yang menjadi pengaruh dalam daya layan suatu pusat pelayanan. Faktor pertama merupakan *a range of good*, faktor ini melihat jarak maksimal yang harus ditempuh untuk mendapatkan layanan yang ada. Faktor kedua adalah *threshold*, yang melihat jumlah maksimal penduduk yang dapat dilayani oleh satu fasilitas pelayanan.

Jika dilihat dari *threshold*, tiap jenis fasilitas ekonomi dapat memenuhi kebutuhan penduduk di tiap kecamatan, baik dari sebelum adanya pemekaran wilayah maupun setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini terlihat pada tabel 5, hanya pada fasilitas warung makan Kecamatan Tulang Bawang Udk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya pada tahun 2007. Hal ini dapat dikarenakan kesalahan dalam pengolahan data oleh instansi terkait.

Fasilitas lainnya yang tidak dapat dipenuhi adalah fasilitas bank di enam kecamatan dan pasar di Kecamatan Pagar Dewa. Rasio perhitungan menunjukkan nilai 0, yang berarti tidak ada perubahan dalam segi jumlah, walaupun pemekaran wilayah telah berlangsung selama lima tahun. Pada skala kecil justru rasio daya layan tertinggi terdapat di wilayah perdesaan, seperti pada Kecamatan Pagar Dewa. Jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi, namun jumlah fasilitas yang disediakan melampaui kebutuhan penduduk, menjadi salah satu faktor penentu

Dengan standar SNI 03-1733-2004, daya layan tiap fasilitas ekonomi dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan standar jumlah minimal penduduk yang diajukan oleh pemerintah tergolong tinggi, sedangkan jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini cukup rendah.

Adanya ketidak-akuratan dalam penggunaan standar ini, mengakibatkan seakan-akan kebutuhan penduduk sangat tercukupi dengan fasilitas yang ada. Padahal di kenyataan. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. Hal ini menjadi suatu kendala sendiri dalam mengetahui daya layan yang benar-benar mewakili representasi kondisi eksisting.

Tabel 5. Daya Layan Fasilitas Ekonomi

Kecamatan	Tahun 2007					Tahun 2011				
	(Sebelum Pemekaran Wilayah)					(setelah Pemekaran Wilayah)				
	P	B	K	Wm	Wr	P	B	K	Wm	Wr
Tulang Bawang Udk	2.0 2	0	28	0.6	1.4	2	0	44	6.9	3.6
Tumijajar	1.5	6. 1	76	8	5.6	2. 2	15	88	5.3	2.8
Tulang Bawang Tengah	2.0 2	1. 6	50	7.5	2.7	2. 3	4.7	67	7.4	3
Pagar Dewa	0	0	25	22	3.9	0	0	25	34	5
Lambu Kibang	1.4 1	0	28	10	4.6	1. 4	0	39	11	5.2
Gunung Terang	6.5 2	0	26	3.3	1.7	5. 9	0	32	3.9	2.8
Gunung Agung	7.3 7	0	4	3	1.4	7. 4	0	4	8.5	5. 3
Way Kenanga	3.1 3	0	13	5.6	1.6	3. 2	0	20	7.7	3.9

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2008 dan Tahun 2012, diolah

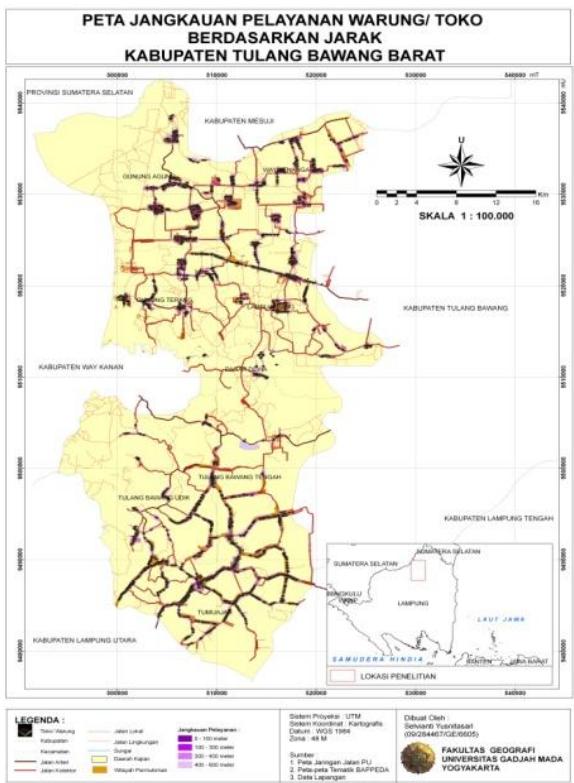
Ket :

P : Pasar K : Koperasi

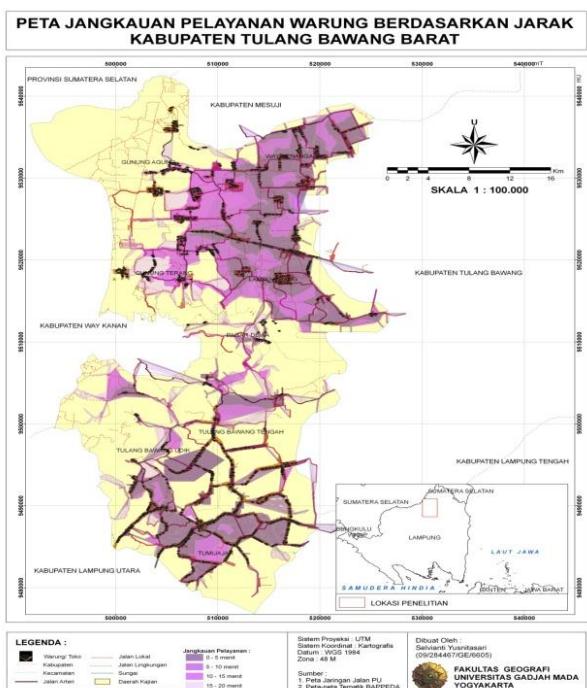
B : Bank Wm: Warung Makan

Wr: Warung

Dari segi *a range of good* dengan menggunakan metode *network analysis* hanya pada fasilitas dengan skala kecil, yaitu warung/toko dan warung makan yang ada dapat mencakupi seluruh wilayah permukiman yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Banyaknya fasilitas warung/toko yang telah memiliki perizinan serta persebaran yang relatif merata diseluruh wilayah permukiman yang ada. dari sgei waktu, waktu tempuh minimal yang ditempuh untuk mencapai warung/toko terdekat adalah 5 menit (Gambar 1). Hal yang sama juga terjadi pada fasilitas warung makan, dengan jarak 2000 meter telah dapat memenuhi kebutuhan penduduk per kecamatan.



Gambar 1. Peta Jangkauan Pelayanan Warung/ Toko Berdasarkan Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat



Gambar 4.2. Peta Jangkauan Pelayanan Warung/ Toko Berdasarkan Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada fasilitas lainnya, yaitu fasilitas bank dan koperasi, terjadi ketimpangan persebaran yang lebih mengarah ke wilayah pusat permukiman, yaitu wilayah bagian selatan. Pembagian wilayah ini berdasarkan Sungai Tulang Bawang yang melintang, membagi Kabupaten ini menjadi dua, yaitu wilayah selatan

dan wilayah utara. Adanya ibukota baru di wilayah bagian selatan, mengakibatkan pembangunan lebih terfokus pada wilayah bagian selatan. Hal yang mencolok terjadi pada pembangunan fasilitas bank, yang hanya tersedia di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar. Kedua kecamatan ini berada di wilayah bagian selatan. Dengan jarak jangkauan sebesar dua meter belum dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan penduduk, terutama pada wilayah bagian utara. Jarak maksimal yang dapat mencakupi keseluruhan wilayah permukiman yang ada di kabupaten ini adalah sebesar 10.000 meter.

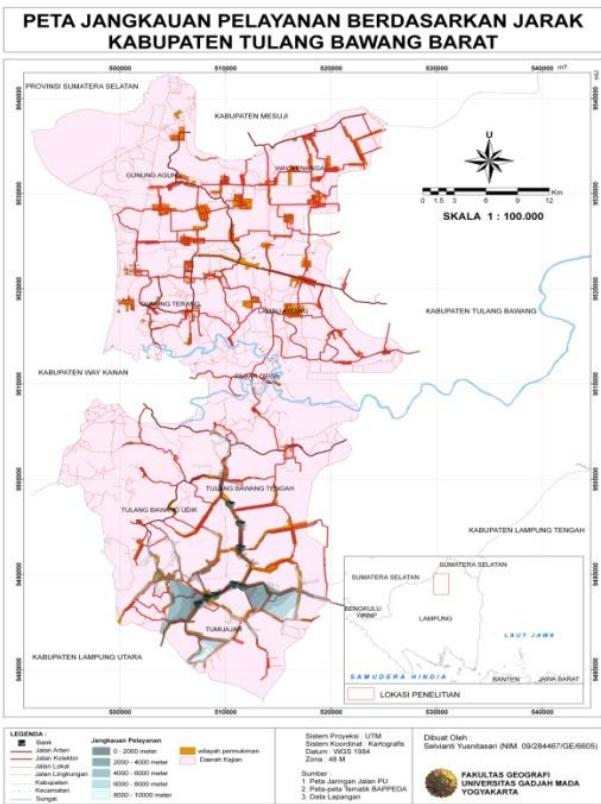
Jarak tersebut ternyata mampu untuk memenuhi kebutuhan sebagian penduduk yang berada di wilayah bagian selatan. namun, hanya Kecamatan Tumijajar yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya dengan jarak antara 8000 hingga 10.000 meter. Hal ini juga dapat dilihat pada jarak rata-rata penduduk per kecamatan. sedangkan kecamatan lainnya memiliki jarak rata-rata lebih dari 10.000 meter

Pada Tulang Bawang Tengah terdapat beberapa kecamatan yang tidak terjangkau, yaitu Desa Mulya Kencana, Penumangan, Penumangan Baru, Bandar Dewa, Menggala Mas, Tunas Asri, Wonokerto, dan Mulya Jaya (Gambar 3).

Ini berbeda dengan teori Christaller (1933). Sebagai orde tertinggi, cakupan wilayah yang dihasilkan juga semakin tinggi. Namun hal ini tidak berlaku pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dikarenakan pola permukiman yang mengikuti pola jaringan jalan. Dengan pola jaringan jalan arteri dan kolektor, tidak terdapat jalan masuk, menjadikan akses penduduk yang ada di wiliyah ini semakin terbatas.

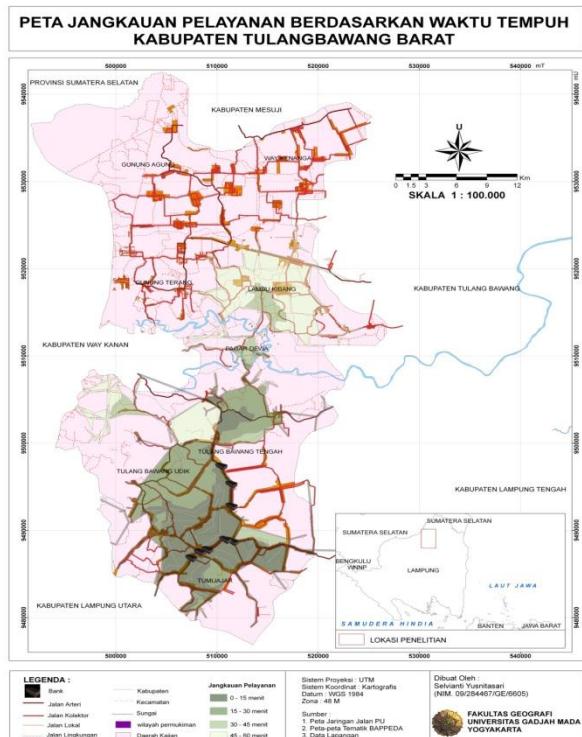
Sementara pada wilayah bagian utara belum dapat tercakup oleh layanan bank dengan jarak 10.000 meter. Untuk mencapai lokasi terdekat penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km, terutama pada wilayah bagian paling utara, seperti Kecamatan Way Kenanga

Untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas bank, penduduk memilih mengakses layanan bank yang berada di kabupaten induk. Masih adanya ketergantungan masyarakat akan fasilitas yang ada di kabupaten induk menjadi salah satu bukti tersendiri, bahwa pemerintah belum mampu menyediakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan publik di daerah otonom baru yang sesuai dengan fungsi pemekaran wilayah itu sendiri.



Gambar 3 Peta Jangkauan Pelayanan Bank Berdasarkan Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sedangkan waktu tempuh yang dapat menjangkau seluruh penduduk yang ada di kabupaten ini adalah sebesar 60 menit, namun tidak semua kecamatan dapat terjangkau. Kecamatan yang tidak dapat terjangkau adalah Pagar Dewa, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga



Gambar 4. Peta Jangkauan Pelayanan Bank Berdasarkan Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat

Hal yang sama juga terjadi pada fasilitas pasar dan koperasi. Jarak 2000 meter belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. peda fasilitas pasar, responden dapat menempuh jarak maksimal untuk menuju pasar sebesar 8000 meter.

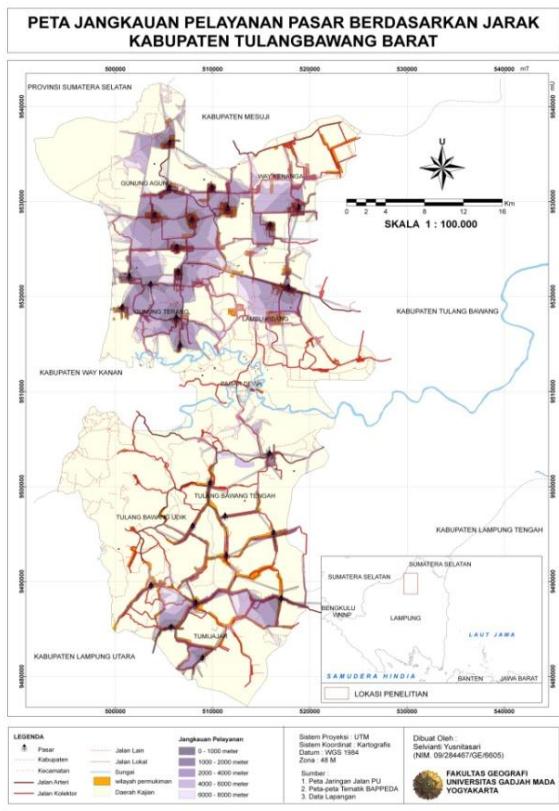
Dengan jarak maksimal responden tersebut, tidak semua wilayah bagian selatan dapat terpenuhi. Justru sebagian wilayah utara, dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Kecamatan tersebut adalah Gunung Agung dan Gunung Terang. pola permukiman yang cenderung *leap frog*, ternyata tidak mempengaruhi jarak jangkauan pelayanan di tiap wilayah permukiman. Ini dikarenakan pada tiap wilayah permukiman mempunyai satu unit pasar, sehingga memudahkan konsumen. Pada wilayah bagian selatan justru terdapat beberapa wilayah permukiman yang tidak terjangkau oleh pasar yang ada. hal ini dikarenakan pola permukiman yang linear dengan jaringan jalan, sehingga tidak tercakup oleh jangkauan pasar dengan jarak 8000 meter (Gambar 5). Karakteristik jaringan jalan yang cenderung tidak terdapat akses masuk, menyebabkan akses menuju pasar hanya terdapat pada jalan yang tersedia.

Salah satu kecamatan yang tidak dapat terjangkau layanan pasar, adalah Kecamatan Pagar Dewa. Seluruh desa yang termasuk dalam kecamatan ini memiliki jarak jangkau 8000 meter. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pasar

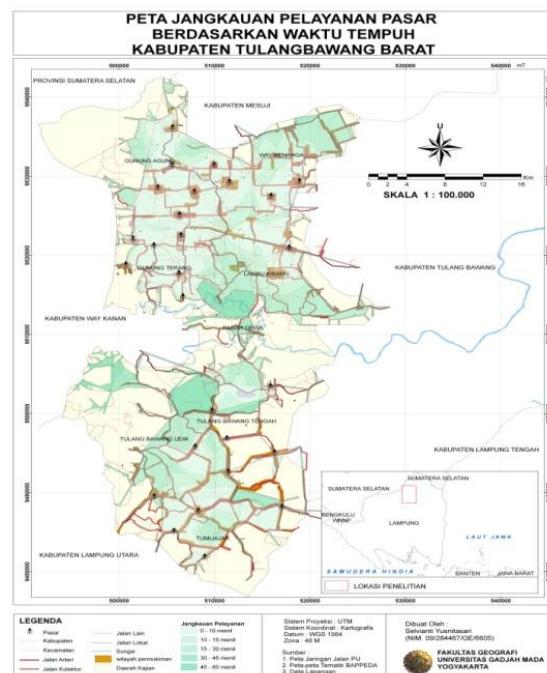
pada wilayah ini. Hal yang sama juga terjadi pada Tulang Bawang Udk. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak dapat terlayani, seperti Gunung Katun Malay, Gunung Katun Tanjungan dan Gedung Ratu Marga.

Dari klasifikasi waktu, jangkauan pelayanan dibagi menjadi lima klas, yaitu 0-10 menit, 10-15 menit, 15-30 menit, 30-45 menit, 45-60 menit. Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang memiliki waktu tercepat dalam menjangkau pasar terdekat dengan rata-rata waktu tempuh adalah 0-10 menit (Gambar 6).

Sedangkan pada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan jarak 8000 meter, untuk mengakses pasar memiliki waktu tempuh antara 45 hingga 60 menit. Daerah-daerah tersebut ialah Kecamatan Pagar Dewa. Pada kedua wilayah tersebut, gradasi warna menunjukkan warna biru yang lebih gelap dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana warna biru pada legenda merepresentasikan waktu tempuh antara 45 hingga 60 menit

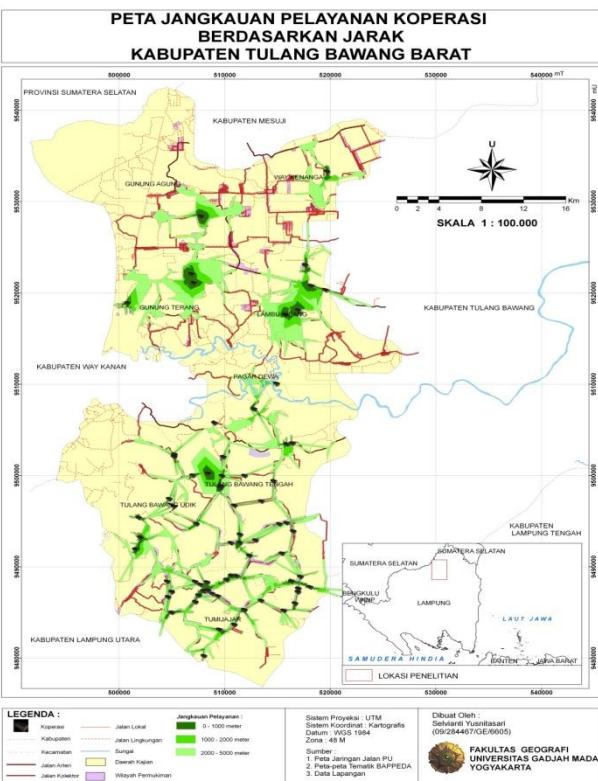


Gambar 5. Peta Jangkauan Pelayanan Pasar Berdasarkan Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat

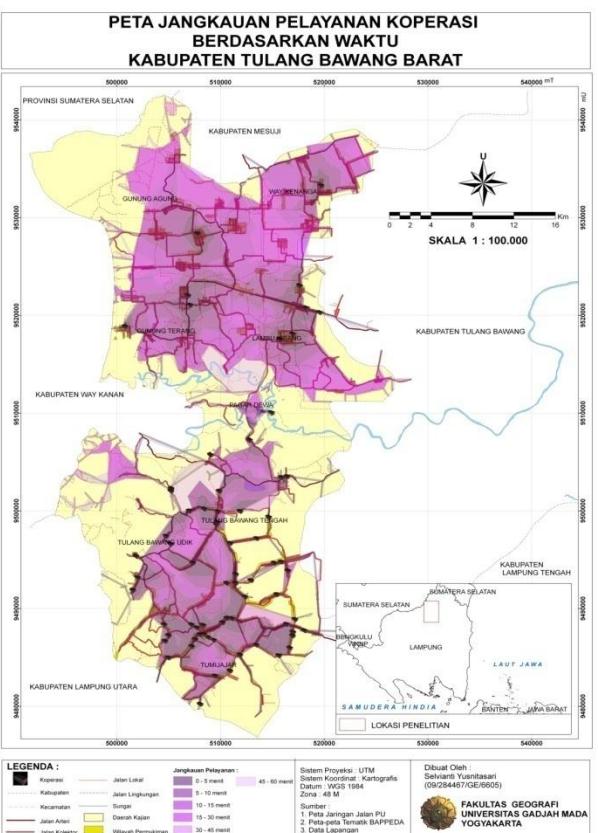


Gambar 6. Peta Jangkauan Pelayanan Pasar Berdasarkan Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dengan standar 2000 meter, koperasi juga belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk mayoritas di Kabupaten ini. Menurut responden jarak maksimal dalam menjangkau koperasi adalah 5000 meter. Namun dengan jarak tersebut ternyata juga belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan, terutama pada Kecamatan Gunung Agung, Pagar Dewa, Lambu Kibang dan Way Kenanga (Gambar 7). Sedangkan untuk waktu tempuh terjauh adalah 45 menit, yaitu pada Kecamatan Pagar Dewa (Gambar 8).



Gambar 7. Peta Jangkauan Pelayanan Koperasi Berdasarkan Jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat



Gambar 8. Peta Jangkauan Pelayanan Koperasi Berdasarkan

Waktu Tempuh Kabupaten Tulang Bawang Barat

3. Penentuan Titik Lokasi Fasilitas Ekonomi

Sebagai kabupaten yang baru berkembang, Tulang Bawang Barat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tujuan awal pemerintah, yaitu untuk mendekatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik pada. Namun dari hasil wawancara dengan stakeholder terkait serta dari hasil penggunaan metode daya layan. Pada fasilitas-fasilitas ekonomi yang memiliki skala pelayanan dengan cakupan luas. Ketersedian

fasilitas tersebut sangat minim, dan cenderung untuk mengelompok di wilayah yang lebih berkembang yaitu wilayah selatan. Dari hal tersebut diperlukan suatu perencanaan arahan lokasi yang tepat, sebagai masukan bagi pemerintah dalam merencanakan pusat pelayanan publik yang harus dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

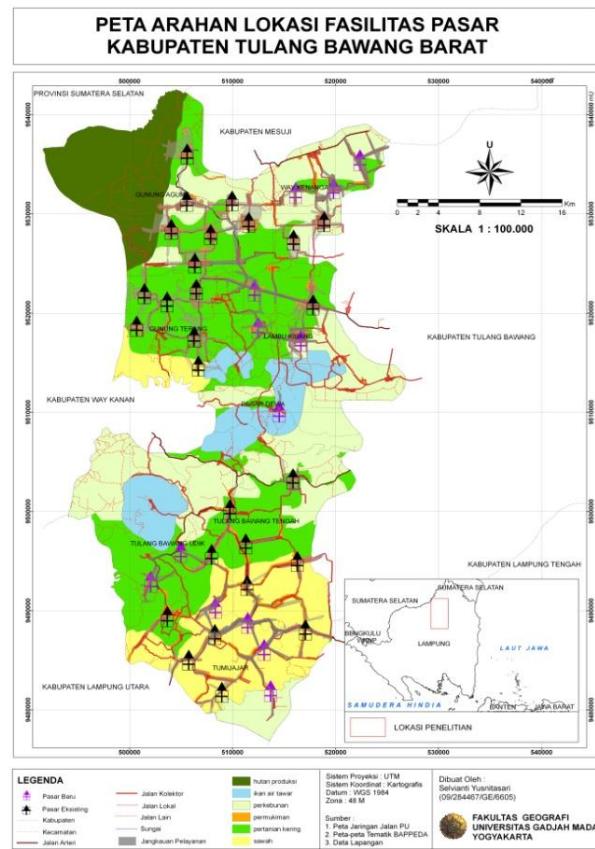
Dari hasil analisis dengan menggunakan metode operasi logika, fasilitas bank yang tidak dapat memenuhi kriteria yang ada, sehingga tiap kecamatan memerlukan arahan lokasi bank. Dua fasilitas lainnya yang memerlukan arahan lokasi adalah fasilitas pasar. dan koperasi.

Tabel 6. Arahan Lokasi Fasilitas Ekonomi

Kecamatan	pasar	bank	kopera si	Toko /warung	Wm
Tulang Bawang Udkik	ya	ya	ya	tidak	tidak
Tumijajar	ya	ya	tidak	tidak	tidak
Tulang Bawang Tengah	tidak	ya	tidak	tidak	tidak
Pagar Dewa	ya	ya	ya	tidak	tidak
Lambu Kibang	ya	ya	ya	tidak	tidak
Gunung Terang	tidak	ya	ya	tidak	tidak
Gunung Agung	tidak	ya	ya	tidak	tidak
Kenanga	ya	ya	ya	tidak	tidak

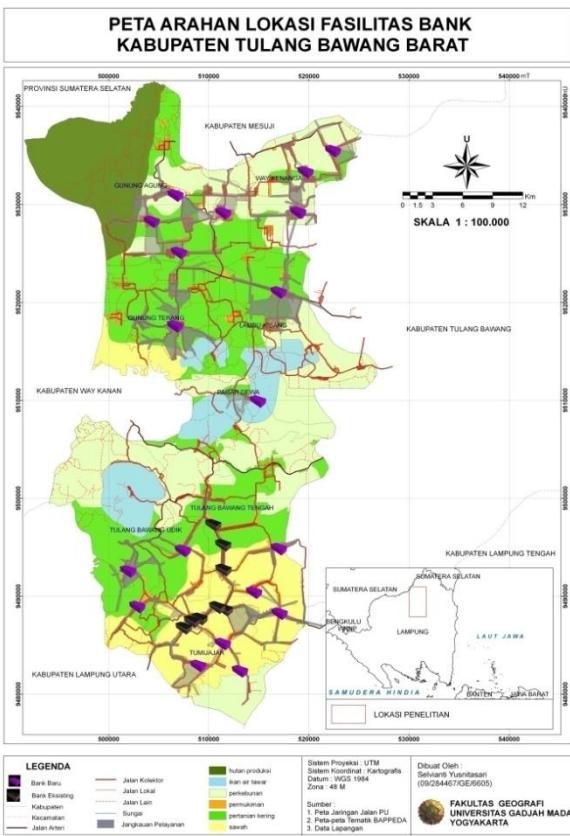
Sumber: Hasil olah data primer, 2013

Penempatan arahan lokasi fasilitas pasar yang ada pada penelitian ini, dilakukan pada lokasi-lokasi permukiman yang tidak terjangkau, serta berada di jalan utama, seperti jalan arteri dan kolektor, dan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan permukiman. Dari beberapa kecamatan, terdapat 13 lokasi fasilitas pasar yang baru dipilih pada penelitian ini (Gambar 9), yaitu enam fasilitas pasar baru pada wilayah bagian selatan, sedangkan tujuh lainnya direncanakan di wilayah bagian utara. Mayoritas arahan terbanyak dilakukan pada Kecamatan Lambu Kibang yaitu sebanyak tiga unit (Desa Kibang Yekti Jaya, Kibang Tri Jaya, Sumber Rejo), Tumijajar sebanyak tiga unit (Murni Jaya, Margo Mulyo, Gunung Timbul) dan Way Kenanga (Pagar Buana, Indra Loka II, Agung Jaya).



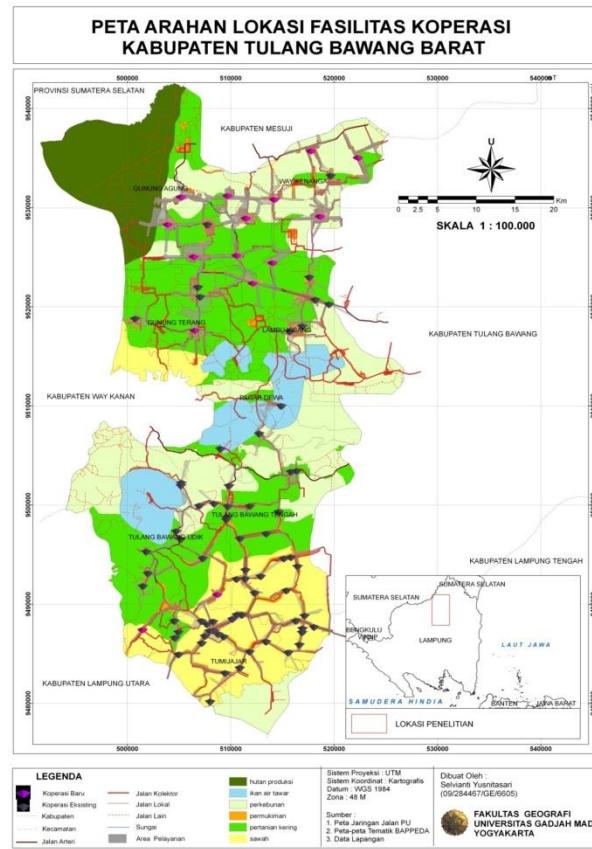
Gambar 9. Peta Arah Lokasi Fasilitas Pasar Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam pertumbuhan bank yang ada, fokus pertumbuhan eksisting terletak pada Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar. Sementara persebaran penduduk yang ada, tidak hanya terletak pada dua kecamatan itu saja, namun juga terletak di enam kecamatan lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas bank di tiap kecamatan, perencanaan lokasi fasilitas bank dilakukan pada tiap kecamatan dengan total 19 lokasi. Arahan terbanyak terdapat di wilayah utara, yaitu sebanyak 10 lokasi. Dimana kecamatan yang memiliki arahan terbanyak terdapat di Gunung Agung, yaitu sebanyak empat lokasi (Desa Tunas Jaya, Suka Jaya, Mulya Jaya, dan Mekar Jaya). Perencanaan dilakukan pada kawasan permukiman yang menjadi pusat pemerintahan, serta memiliki luas permukiman yang besar (Gambar 10).



Gambar 10. Peta Arahan Lokasi Fasilitas Bank Kabupaten Tulang Bawang Barat

Untuk memenuhi jarak ideal responden pada wilayah utara fasilitas koperasi baru yang direncanakan pada wilayah ini berjumlah 13 unit dari total 15 unit (Gambar 11). Dengan jumlah penentuan lokasi terbanyak terdapat pada Gunung Agung, yaitu sebanyak lima unit (Suka Jaya, Mulya Jaya, Bangun Jaya, dan Tri Tunggal Jaya). Pada desa Tri Tunggal Jaya, diarahkan dua titik lokasi koperasi baru. Tingginya jumlah arahan koperasi di kecamatan ini, dikarenakan perkembangan Kecamatan Gunung Agung yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Seperti pada fasilitas bank, penentuan posisi lokasi fasilitas koperasi juga dilakukan pada pusat permukiman, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkaunya (Gambar 11). Kecamatan lainnya yang memerlukan koperasi dengan jumlah yang besar adalah Way Kenanga, dengan jumlah arahan titik koperasi sebesar tiga unit. Hal ini dikarenakan wilayah ini memiliki akses terbatas dalam mencapai kecamatan lainnya, sehingga dibutuhkan ketersediaan koperasi yang cukup, baik dari segi jumlah maupun dari segi jarak. Selain hal tersebut ketersediaan koperasi eksisting pada dua kecamatan tersebut, relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



Gambar 11. Peta Arahan Lokasi Fasilitas Koperasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tidak terjadi pertumbuhan fasilitas ekonomi jika dilihat dari uji *paired sample t test*. hanya koperasi yang berkembang, hal ini terlihat dari nilai *sig 2 tailed* yang kurang dari 0,05. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi ketimpangan pertumbuhan khususnya pada Pasar dan Bank. Pertumbuhan fasilitas cenderung mengarah pada wilayah perkotaan dan *rural urban*.
 2. Baik sebelum adanya pemekaran wilayah maupun setelah adanya pemekaran wilayah, *threshold* tertinggi terdapat di wilayah utara, terutama pada fasilitas skala kecil, seperti Warung/ Toko dan warung makan. Sedangkan pada *a range of good*, nilai tertinggi terletak pada wilayah perkotaan.
 3. Penentuan titik lokasi fasilitas dilakukan pada tiga jenis fasilitas ekonomi, yaitu koperasi, bank serta pasar. Ketiga fasilitas ini merupakan fasilitas yang mengalami persebaran tidak merata. Titik lokasi yang tepat dalam perencanaan ketiga fasilitas ini pada Kabupaten Tulang Bawang Barat

adalah pada kawasan permukiman yang tidak dapat terjangkau oleh fasilitas ekonomi yang telah ada, yaitu mayoritas pada kecamatan yang berada wilayah utara.

Saran

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah sebagai penyelenggara, pengawas, serta pengatur kebijakan, dalam rangka peningkatan pertumbuhan fasilitas ekonomi terutama fasilitas yang memiliki skala cakupan besar seperti pasar, koperasi, serta bank, terutama pada wilayah bagian utara Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Diperlukan perbaikan standar mengenai daya layan yang dapat mewakili kebutuhan sebenarnya dari daerah berkembang seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Peningkatan mutu kualitas dari masing-masing fasilitas pelayanan publik juga diperlukan dalam hal pengembangan fasilitas yang ada, adanya pemerintah baru dapat menjadi jembatan dalam pemberian kebijakan untuk mengatur kualitas dari masing-masing fasilitas pelayanan ekonomi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika. (2012). *Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2012*. Lampung: BPS Tulang Bawang Barat

Badan Pusat Statistika. (2011). *Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2011*. Lampung: BPS

- Tulang Bawang Barat.
- Badan Pusat Statistika. (2010). *Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2010*. Lampung: BPS Tulang Bawang Barat.
- Badan Pusat Statistika. (2009). *Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2009*. Lampung: BPS Tulang Bawang Barat.
- Badan Pusat Statistika. (2008). *Tulang Bawang Dalam Angka 2008*. Lampung: BPS Tulang Bawang.
- Creswell. John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harmantyo, Djoko. (2007). Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi dan Implementasinya di Indonesia. *Makara Sains 11 (1) : 16-22*.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Stainberg, Steven J dkk. (2006). *GIS Geographic Information Sistem For the Social Science Investigating Space and Place*. USA: Sage publication.
- Tarigan, Antonius. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. *Majalah Perencanaan Pembangunan 01: 22-26*.
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999